

BAB III

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS REPRESENTASI KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM IKLAN POLITIK LUAR RUANG DPR RI DALAM PEMILU 2014

Penelitian analisis representasi keistimewaan Yogyakarta dalam iklan luar ruang calon legislatif DPR RI akan dianalisis secara tekstual dengan mengamati tanda-tanda yang terdapat dalam iklan tersebut yang diamati dari sisi visualnya. Dari segi visualnya akan dilihat dari cara para caleg merepresentasikan Yogyakarta, pakaian dan pemilihan bahasa.

A. Representasi Keistimewaan Yogyakarta Dalam Konteks Politik

Wacana tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diajukan pemerintah belum mendapat lampu hijau dari warga Yogyakarta. Permasalahan ini semakin memanas pasca munculnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Kabinet 26 November 2010. Pernyataan Presiden mengenai sistem pemerintahan monarki dan demokrasi mengundang pendapat dan spekulasi dari berbagai pihak. Pendapat politik Presiden SBY bahwa tidak ada sistem monarkhi dalam penyusunan RUUK DIY karena akan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi direspon dengan pernyataan politik pula oleh Sri Sultan HB X (Radar Jogja, Minggu 28

pemerintah pusat dengan pihak keraton Yogyakarta (Herlambang, 2012: 1).

Hubungan pemerintah pusat dengan wilayah Yogyakarta sempat tidak baik saat Pemerintah pusat membuat rancangan maklumat no.18 tahun 1946 yang menjadikan daerah Yogyakarta tanpa embel-embel istimewa (Lutfi, 2009:40). Tentu saja rancangan maklumat ini ditolak oleh kedua kerajaan Yogyakarta. Mereka tetap kukuh mengajukan wilayah Yogyakarta sebagai wilayah istimewa. Setelah mengadakan serangkaian perundingan, akhirnya pemerintah pusat mensahkan Undang-undang No.3 tahun 1952 yang mengakui secara resmi penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman sebagai daerah otonom dengan kedudukan setingkat propinsi (Lutfi dkk, 2009:40).

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini pantas disebut sebagai Ksatria Mataram. Tenang, pendiam, pengayomi rakyatnya. Tapi juga tidak segan, berani mengambil keputusan, jika dinilai bisa membantu kesejahteraan rakyatnya (Poor,2011:215). Ketika Republik Indonesia masih berusia muda dan praktis sebenarnya bangkrut karena agresi militer Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada awal Januari 1946 sudah menawarkan kepada pemerintahan Republik Indonesia untuk pindah ke Yogyakarta. Tawaran yang diiringi dengan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan memberikan bantuan keuangan dan fasilitas kepada pemerintahan Republik

Indonesia yang tengah masih sangat muda saat itu oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman merupakan bukti bagaimana kedua kerajaan Yogyakarta ini serius untuk bergabung dengan Indonesia.

Polemik keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya wacana yang terus menjadi diskusi yang menarik dari jaman kejaman, paling terakhir adalah polemik keistimewaan beberapa tahun yang lalu, yang mampu menggerakkan massa Yogyakarta yang pro keistimewaan turun ke jalan. Tekanan terhadap pemerintah tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejak Sri Sultan HB X menjabat sebagai Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan dan kemudian memasuki masa reformasi, pembahasan mengenai Keistimewaan DIY hanya sebatas wacana. Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam dua kali masa jabatan. Sampai masa jabatan periode kedua habis, pembahasan keistimewaan DIY belum juga menemukan titik terang hingga presiden memperpanjang masa jabatan tiga tahun sampai Oktober 2011 kepada Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX. Rancangan UUK DIY yang diharapkan telah selesai sebelum periode perpanjangan jabatan selesai ternyata belum terwujud. Sultan HB X dan Paku Alam IX kembali

Perumusan RUUK DIY justru kini menjadi semakin alot dan tertunda. Permasalahan ini sejatinya tidak akan memanas bila ada kesepahaman antara pemerintah pusat dengan masyarakat Yogyakarta. Pemerintah pusat- yang diwakili oleh Mendagri, Gamawan Fauzi - melalui pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (UU No.5 tahun 1974) mengendaki mekanisme pemilihan. Sedangkan masyarakat Yogyakarta dengan berpegang pada Pasal 18 UUD 1945 menghendaki adanya penetapan. Desakan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY pun semakin besar. Dalam Sidang Paripurna terbuka DPRD DIY, puluhan ribu warga Jogja memadati Jalan Malioboro untuk menyatakan dukungan terhadap penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY (Koran Bernas, Selasa 14 Desember 2010). Hal tersebut mengacu pada eksistensi status hukum keistimewaan DIY selanjutnya (Herlambang, 2012: 3).

Pemilu 2014 adalah pemilu pertama yang berlangsung setelah keistimewaan diberikan pada Yogyakarta. Pemberian status keistimewaan pada Yogyakarta sendiri mengundang polemik yang berkepanjangan. Jika pada sekitar proklamasi kemerdekaan, status keistimewaan Yogyakarta nyaris tidak terbantahkan, maka perjalanan waktu membuat keistimewaan Yogyakarta dipersoalkan oleh pihak tertentu.

Untuk melihat persoalan keistimewaan Yogyakarta, kita bisa

Hamengku Buwono X menjadi salah satu motornya, tidak hanya berujung pada lengsernya Presiden Soeharto dan kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Wacana demokratisasi yang menyeruak seiring kejatuhan Orde Baru, menjadikan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tidak lagi seolah menjadi kitab suci yang tidak dapat diubah.

Amandemen terhadap UUD 1945, yang selama Orde Baru menjadi sesuatu yang tabu, terjadi di pasca tahun 1998 sebagai respon terhadap demokratisasi yang mengemuka. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UUD 1945 memiliki cacat bawaan, seperti minimnya muatan Hak Asasi Manusia (HAM), tiadanya *check and balance*, lemahnya *distribution of power* antara lembaga eksekutif dan legislatif, adanya *executive heavy*, dan kenyataan bahwa UUD 1945 tidak pernah mampu melahirkan pemerintahan yang demokratis (Subekti dalam Arifin,2014:5).

Amandemen terhadap konstitusi ini berimplikasi juga pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, salah satunya adalah pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengandung semangat bahwa tatanan pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang ada di Yogyakarta harus seragam dengan daerah lain, seperti peraturan tentang ketatapemerintahan pada propinsi lain (Darmawan, 2010:6) Aturan ini secara jelas akan menghapus keberadaan keistimewaan yang melekat

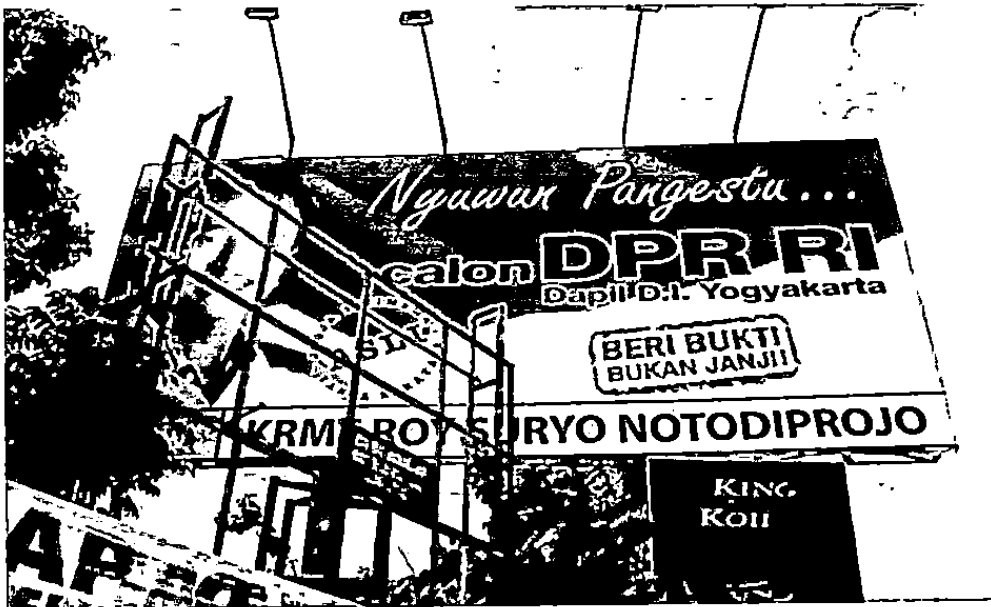
Namun dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengeluarkan baru yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekaligus menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya tidak berlaku kembali. Dengan demikian UU No. 22 tahun 1999 hanya berusia lima tahun. Peraturan perundang-undangan yang baru ini pada hakikatnya memberikan penguatan pada keistimewaan Yogyakarta, tetapi hanya akan mengatur keistimewaan Yogyakarta secara khusus seperti propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh dan Papua. Undang-undang ini, walaupun memberikan penguatan pada keistimewaan Yogyakarta, namun tidak mendapat dukungan rakyat Yogyakarta. Penolakan terjadi di parlemen daerah maupun wacana yang berkembang di publik. Resistensi masyarakat Yogyakarta berlanjut hingga tahun 2007, pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono X akan berakhir, sementara Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta belum ada. Hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden untuk memperpanjang masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sampai akhir 2011 (Arifin, 2014:6)

Besarnya dukungan publik akhirnya membuat pemerintah pusat tidak berketik. Keistimewaan pada Yogyakarta akhirnya diberikan kepada propinsi ini melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberian status keistimewaan pada Yogyakarta dimanfaatkan oleh para politisi yang bertarung dalam Pemilu 2014 dalam

komunikasi politik yang mereka lakukan, terutama melalui media iklan luar ruang. Spanduk, baliho dan poster yang dipasang oleh para politisi banyak menggunakan jargon-jargon keistimewaan Yogyakarta untuk merebut hati rakyat Yogyakarta.

Berikut adalah beberapa iklan baliho poster dan spanduk milik politisi yang tersebar di kawasan Yogyakarta beserta analisisnya.



Gambar 3.1.1 : Baliho calon anggota DPR RI dari partai Demokrat.

Dalam iklan di atas digambarkan bahwa Roy Suryo sedang meminta dukungan masyarakat Yogyakarta untuk memilih dirinya sebagai anggota DPR RI. Di dalam gambar terlihat dia sedang tersenyum, menggunakan warna merah dan putih sebagai *background* iklannya, kata "Nyuwun Pangestu", di tulisan calon DPR RI menggunakan warna biru, tagline yang bertuliskan BERI BUKTI BUKAN JANJII! dan dilengkapi dengan nama lengkapnya yaitu KRMT Roy Suryo Notodiprojo serta teks bergaya stempel bertuliskan "Jogja Istimewa Asli Tanpa Rekayasa". Itulah

iklan tersebut sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh (Danesi, 2012: 295) *periklanan politik dan sosial*, yang dimanfaatkan oleh kelompok dengan minat khusus (seperti kelompok anti rokok) dan politisi untuk mengiklankan pandangan mereka.

Makna Konotasi dalam gambar 3.1.1 adalah Roy Suryo menampilkan warna merah putih pada latar iklan dan baju yang dipakainya. Penggunaan dan pemilihan warna merah putih ini jelas untuk memperlihatkan sisi nasionalisme yang hendak ditonjolkan dalam politik representasi iklan ini. Perpaduan warna merah dan putih telah dipilih bangsa Indonesia sebagai warna bendera nasional bangsa Indonesia. Alih-alih menggunakan jas, Roy Suryo memilih menggunakan kemeja berwarna merah putih dalam iklan politiknya. Posisinya sebagai menpora, agaknya ingin ditonjolkan dalam representasi yang memperlihatkan sisi generasi muda dengan memilih menggunakan kemeja bukan jas. Pemilihan warna biru dalam tulisan calon DPR RI dalam konteks Jawa mempunyai makna bahwa warna biru melambangkan keturunan bangsawan.

Sedangkan kata “Nyuwun Pangestu”, yang menjadi pembuka dalam naskah iklan, adalah frase dalam Bahasa Jawa yang berarti meminta restu. Kalimat ini mengandung representasi bahwa Roy Suryo meminta dukungan dari publik Yogyakarta. Pada naskah iklan, Roy Suryo menempatkan kata “Istimewa”. Penempatan kata ini diperkuat

dan kata “Istimewa” dalam tulisan “Istimewa Asli Tanpa

Rekayasa". Pengulangan kata "istimewa" memperlihatkan penonjolan pada isu keistimewaan Yogyakarta dalam iklan politik Roy Suryo.



Gambar 3.1.2 : Gambar Roy Suryo saat menganalisis video sebagai pakar telematika

Visual teks bertuliskan "Jogja Istimewa Asli Tanpa Rekayasa" juga berkaitan dengan latar belakang Roy Suryo yang juga mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, yang sering menggunakan kata "Asli Tanpa Rekayasa" saat menganalisis rekaman video yang kontroversial, terutama yang melibatkan selebritis. Kata "asli tanpa rekayasa" menjadi bahasa yang sering ditulis oleh jurnalis di media massa terkait dengan sebuah kasus video atau foto yang kontroversial,



Gambar 3.1.3 : Baliho calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat

Sepasang calon anggota DPR RI yang mengenakan baju adat Jawa lengkap dan mereka sedang tersenyum. Dalam iklannya mereka menggunakan warna biru sebagai *background*. Di dalam iklan tersebut juga terdapat kata “Nyuwun Sewu & Matur Nuwun” dan tagline yang bertuliskan BERI BUKTI BUKAN JANJI! dan dilengkapi dengan nama lengkapnya yaitu KRMT ROY SURYO-ISMARINDAYANI, SH, MH, CN serta teks bergaya stempel bertuliskan “Jogja Istimewa Asli Tanpa Rekayasa”. Penjelasan di atas adalah merupakan makna denotasi yang ada di dalam gambar 3.1.3.

Sedangkan makna konotasi yang terdapat dalam gambar 3.1.3 adalah sepasang calon anggota DPR RI yang memakai baju adat Jawa, bila menurut orang Jawa jika memakai pakaian adat Jawa mencerminkan orang yang sopan, santun dan berbudi pekerti luhur. Ini di tunjukan dengan penulisan kata “Nyuwun Sewu” yang besar untuk mengawali kalimat

“Nyuwun Sewu” yang terdapat dalam bahasa Indonesia berarti

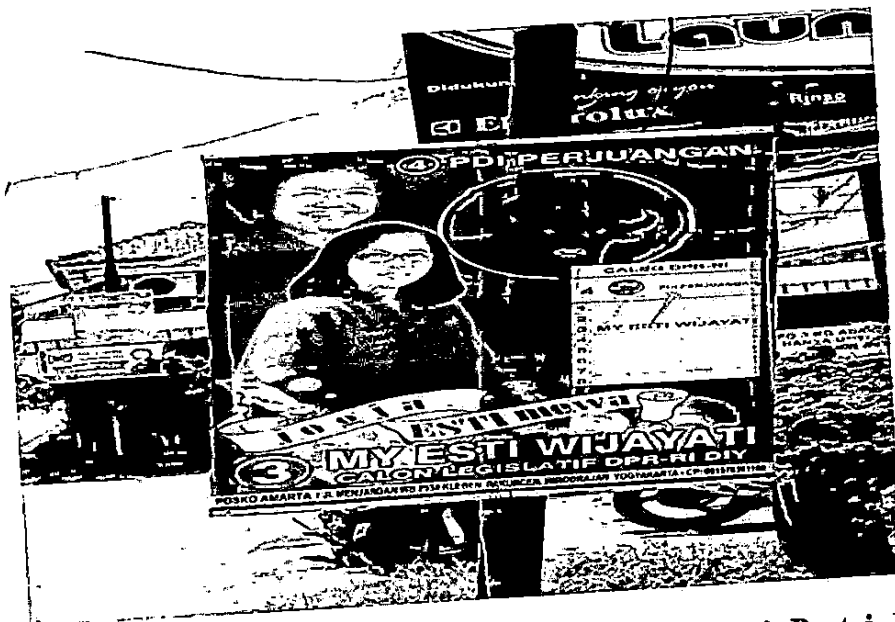
permisi ini, bagi orang Jawa merupakan tindakan atau ucapan yang merupakan wujud kesopanan atau tata krama. Selanjutnya kata “matur nuwun”, yang ada di dalam dalam naskah iklan, adalah frase dalam Bahasa Jawa yang berarti terima kasih. Kalimat ini mengandung representasi bahwa Roy Suryo mendapatkan dukungan dari publik Yogyakarta.

Kemudian pemilihan warna biru pada *background* iklannya juga ingin menunjukkan bahwa Roy Suryo masih memiliki keturunan darah biru, sebutan darah biru itu dikarenakan adanya hubungan darah antara raja-raja dulu hingga keturunan kesekian yang masih hidup di masa kini, dan masih ada jalinan kekeluargaan yang kental dengan orang-orang yang dulu terpendang dan berpengaruh pada peradaban masyarakat. Hal ini berhubungan pemasangan gelar nama di dalam iklannya, yaitu KRMT ROY SURYO. Roy Suryo memakai gelar KRMT karena ia masih merupakan keluarga keraton, (Kanjeng Raden Mas Tumenggung). Dalam memproduksi makna darah biru melalui dua tahapan. Pertama, representasi (raja sebagai simbol kekuasaan) dan yang kedua, ideologi (merujuk pada mitos penghormatan berlebih dari garis keturunan). Hasilnya, ia menjadi eksklusif, yang secara ideologis tidak bisa disamakan dengan dimensi lain yang berada di luar garis keturunan yang dimaksud. Dalam tahap berikutnya, terciptalah strata dan kasta berbasis keturunan. Disini, dapat dilihat adanya imperialisasi ideologis terhadap paradigma

“Jogja Istimewa Asli Tanpa Rekayasa” juga menjadi representasi yang hendak ditonjolkan oleh Roy Suryo dengan seolah memberikan klaim bahwa keistimewaan Yogyakarta memang sesuatu yang sifatnya ‘asli’ tanpa ada rekayasa. Klaim yang sebenarnya berseberangan dengan sikap politisi Partai Demokrat di masa sebelumnya yang oleh publik dilihat melakukan rekayasa untuk menjegal keistimewaan Yogyakarta.

Mitos yang terdapat pada gambar 3.1.1 dan 3.1.2 ialah bagaimana seorang Roy Suryo memanfaatkan gelar keturunannya yaitu KRMT (Kanjeng Raden Mas Tumenggung). Terlihat sekali bagaimana pembangunan citra dirinya sebagai sosok keturunan dari tokoh atau kerajaan yang terlibat langsung saat Yogyakarta bergabung dengan Indonesia dan sebagai keturunan yang memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta dari saat pertama kali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seolah ia ingin menunjukkan bahwa orang besar dilahirkan dari orang besar. Konteks identitas Jawa yang diperlihatkan melalui “nyuwun sewu” dan “matur nuwun” dengan ukuran besar dan penulisan gelar kebangsawanan adalah untuk mempertegas posisinya yang merupakan warga Yogyakarta dengan menunjukkan identitas asalnya. Pemilihan kata “nyuwun sewu” dan “matur nuwun” dan penulisan gelar kebangsawanan merujuk pada kepentingan untuk mendapatkan simpati masyarakat Yogyakarta. Identitas asal inilah yang dimanfaatkan oleh Roy Suryo untuk mendapatkan simpati masyarakat Yogyakarta sekaligus bagian dari Yogyakarta. Roy Suryo memanfaatkan simbol-simbol atau

makna-makna yang sifatnya historis dan dapat diterima oleh masyarakat Yogyakarta, yakni pesan yang menjelaskan bahwa ia bagian dari Yogyakarta dengan gelar kebangsawanannya serta pemakaian bahasa Jawa.



Gambar 3.1.4 : Baliho calon anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan.

Pada iklan di atas makna denotasi yang muncul adalah seorang perempuan dengan menggunakan kacamata yang di belakangnya terdapat sosok seorang Ibu Megawati. Terdapat juga *tagline* “jogja ESTI mewa” dan dicantumkan nomor urut dan gambar kertas suara. Ada pula lambang partainya yang berupa banteng di dalam lingkaran merah.

Warna merah yang menjadi latar belakang iklan tersebut melambangkan keberanian, seperti halnya warna putih yang melambangkan kesucian. Dalam iklan tersebut juga menampilkan sosok megawati. Sosok My Esti Wijayati di dalam iklan tersebut mengenakan

kacamata yang seakan-akan memberikan kesan kemiripan terhadap sosok yang ada di belakang dirinya yaitu Megawati. Dalam iklan tersebut kata “jogja ESTI mewa” dimunculkan karena ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mendukung agar jogja tetap istimewa, kata yang seharusnya Jogja Istimewa ia plesetkan menjadi namanya agar masyarakat mudah mengingat dirinya. Kemudian gambar paku dan kertas suara yang bertuliskan namanya yang ada dalam gambar tersebut dimaksudkan agar masyarakat memilih dirinya. Hal yang telah dijelaskan di atas merupakan konotasi yang ada pada gambar 3.1.4.

Mitos yang ada pada gambar 3.1.4 hampir sama dengan mitos yang terdapat pada gambar 3.1.1 dan 3.1.2. Seperti yang telah diulas diatas, walaupun mengangkat pesan kebangsaan dan keistimewaan, namun kekuatan pesan yang mencoba menginternalisasi masyarakat melalui pesan keistimewaan tidak sekuat milik Roy Suryo. Pemilihan tagline “jogja ESTI mewa” adalah untuk mendapatkan simpati dari warga Yogyakarta dan untuk membuktikan bahwa ia juga merupakan bagian dari warga Yogyakarta. Disini My Esti Wijayati mencoba mengingatkan kembali kepada kita siapa sosok Megawati itu. Megawati adalah mantan Preseiden RI yang merupakan putri dari Presiden kita yang pertama yaitu Ir. Soekarno. Ir. Soekarno juga mendukung keistimewaan setelah menerima surat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII yang berisi ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan Republik Indonesia sehari setelah mendengar Proklamasi

istimewa dari Presiden Soekarno berupa pemberian Piagam Penetapan tertanggal 19 Agustus 1945, yang intinya Presiden Soekarno menetapkan Sri Sultan dan Paku Alam tetap pada kedudukannya dengan kepercayaan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia (<http://ahok.org/tentang-ahok/dpr/undang-undang/soekarno-%E2%80%9Djangan-sekali-kali-melupakan-sejarah%E2%80%9D/>)

diakses pada 4 Oktober 2014 pukul 18.15 WIB. Isi piagam penetapan itu adalah,

“Piagam Kedudukan Sri Paduka' Inggeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX. Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Inggeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Inggang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Sukarno”

(<http://m.news.viva.co.id/news/read/180314-mengapa-yogyakarta-disebut-istimewa>) diakses pada 4 November 2014 pukul 19.00

B. Budaya Identitas Kebudayaan

Stuart Hall dalam karyanya *Cultural Identity and Diaspora* menjelaskan bahwa identitas budaya (atau disebut juga sebagai identitas seni) sedikitnya dapat dilihat dari dua cara pandang, yaitu identitas budaya sebagai wujud (*identity as being*) dan identitas budaya sebagai proses menjadi (*identity as being*), (Hall dalam Prabowo, 2008: 8). Dalam cara

seatu kesatuan yang dimiliki bersama, atau yang merupakan “bentuk dasar/ asli” seseorang dan berada dalam diri banyak orang yang memiliki kesamaan sejarah dan leluhur. Identitas budaya adalah cerminan kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang membentuk sekelompok orang menjadi “satu: walaupun dari ‘luar’ mereka tampak berbeda. Hal ini dapat berarti juga, selain dari kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang menyatukan mereka, sudut pandang ini melihat bahwa ciri fisik atau lahiriah mengidentifikasi mereka sebagai suatu kelompok.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Yogyakarta mempunyai sejarah besar dalam bagian sejarah Republik Indonesia. Kehadiran Kraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, Gunung Merapi, Pantai Laut Selatan, dan lain-lain menjadi bagian tak terpisahkan yang membuat para budayawan, seniman baik lokal maupun mancanegara datang berbondong-bondong ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri sering diadakan pagelaran budaya baik dalam adat Jawa itu sendiri dan para seniman lokal dan mancanegara berkolaborasi menyuguhkan Musik, Teater, Pantomim, dan lain-lain

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan memiliki daya tarik tersendiri. Selain kualitas pendidikannya bagus, biaya hidup di Yogyakarta juga murah dan budayanya tetap terjaga. Tak heran bila minat masyarakat luar daerah untuk melanjutkan pendidikan di Yogya sangat tinggi. Bahkan lokasi Yogyakarta yang rawan bencana tak menyurutkan minat masyarakat luar daerah datang ke Yogyakarta

<http://krjogja.com/read/178323/sebagai-kota-pendidikan-yogya-tetap->

Budaya dan kultur Jawa serta keramahan masyarakat setempat teracik menjadi satu kehidupan yang dinamis di dalam perkembangan kota yang semakin modern. Ini adalah ciri khas dan daya tarik yang unik serta menjadi magnet tersendiri untuk wisatawan atau siapapun yang berkunjung ke Yogyakarta, dipastikan memiliki keinginan untuk datang kembali ke kota ini.

Upacara tradisional merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Kelestarian upacara tradisional tersebut dimungkinkan oleh fungsinya bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Upacara tradisional akan mengalami kepunahan apabila tidak memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Upacara tradisional mengandung berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh warga masyarakat pendukungnya. Aturan tersebut tumbuh dan berkembang secara turun temurun dengan perannya yang dapat melestarikan ketertiban hidup bermasyarakat. Sekaten merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara Sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Upacara ini diselenggarakan secara periodik satu tahun sekali yaitu setiap tiap tanggal 5 sampai 11 Rabi'ul Awal (atau dalam kalender Jawa disebut bulan Mulud). Upacara sekaten tersebut ditutup pada tanggal 12 Rabi'ul Awal dengan menyelenggarakan upacara Garebeg Mulud (<http://www.bpadiogja.info/file/SEKATEN.pdf>) diakses 28 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB.



Gambar 3.1.5 : Perayaan Sekaten

Dalam khazanah spiritual budaya Jawa, sebuah tradisi memang memiliki akar yang sangat kuat bagi kalangan masyarakat sekitar. Bahkan, tradisi itu dianggap sebagai simbol keselamatan dan keberkatan dari Tuhan sehingga perlu dilestarikan eksistensinya. Sebagai sebuah warisan sejarah, sebuah tradisi ritual tidak bisa lepas dari kepercayaan masyarakat sebelumnya yang sudah mengenal upacara-upacara keagamaan yang bersifat mistis-religius. Diantara sekian banyak tradisi dan budaya yang menarik dicermati adalah perayaan sekaten yang biasa digelar menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sekaten merupakan salah satu kebudayaan yang lahir dan tumbuh berkembang atas dasar inspirasi Islam yang mengandung nilai-nilai spiritual agama. Dalam sekaten terdapat relasi positif antara aspek budaya dan agama, bahkan bisa dikatakan bahwa “akar tunjang” Sekaten itu sesungguhnya adalah agama (Asep

islam/gaya-sufi/14/01/12/mzai21-sekaten-dalam-spirit-maulid-nabi)

diakses 28 Oktober 2014 pukul 15.30 WIB.

Dengan keindahan alam yang memikat, seni budaya dan tradisi serta ditambah dengan keramah tamahan masyarakat, menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Di kota ini juga begitu mudahnya ditemukan berbagai atraksi pertunjukan seni, gallery serta balai budaya. Yogyakarta juga terkenal dengan segala sesuatu yang murah meriah, itulah sebabnya banyak sekali wisatawan yang datang ke Yogyakarta khusus untuk berbelanja.

Yogyakarta terkenal dengan seni dan budayanya, yang menjadi tujuan wisata turis asing. Wisata kuliner dan alam yang membuat tempat tersebut menjadi tujuan favorit untuk turis lokal maupun turis asing dari berbagai negara. Ada banyak wisata alam seperti pantai yang berada di selatan Yogyakarta, kemudian juga terdapat gunung berapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu, Yogyakarta juga terkenal dengan pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam oleh-oleh tradisional khas Yogyakarta yang berada di kawasan Malioboro.

Sejarah sering kali kita lupakan, seakan sejarah hanyalah sesuatu yang berlalu saja padahal bila kita memperhatikan nilai dan kandungan sejarah semua itu bisa kita jadikan sebuah cerminan serta pelajaran. Begitu pula sejarah mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia khususnya di Jawa, perkembangan inilah yang menjadi sorotan dimana disini terjadinya

yang berdampak terhadap perubahan identitas kota menuju identitas kota baru. Perubahan yang dihasilkan dari aplikasi modernisasi yang mulai bergulir sejak awal abad ke-20 dan perubahan pandangan masyarakat itu sendiri.

Modernisasi berdampak pada perubahan masyarakat yang menyeluruh, hampir semua aspek kehidupan mulai dari aspek politik, ekonomi hingga budaya. Keadaan ini dapat dirasakan di sejumlah kota yang notabene kota tradisional atau kota budaya, seperti yang terjadi di Yogyakarta.

Yogyakarta secara antropologi adalah kota budaya yang lekat dengan adat istiadat dan tradisi. Namun, identitas sebagai kota budaya atau kota tradisional tidak mampu menahan arus modernisasi dan perubahan yang masuk ke kota tersebut, ini menjadi brand atau slogan kota budaya seakan tidak berarti karena terjadi transisi dari kota tradisional menuju kota modern. Perubahan kebudayaan pun dapat kita lihat dari berbagai segi diantaranya berubahnya tradisi busana masyarakat seperti yang terjadi dikalangan kaum perempuan jawa. Penggunaan kain kebaya sudah mulai ditinggalkan dan beralih pada busana-busana yang lebih modern seperti penggunaan rok, pakaian berkembang ke arah etika dan estetika sehingga kemudian muncul istilah *dress code* untuk acara-acara tertentu, seperti halnya kain kebaya dipakai hanya untuk acara atau *ceremony* tertentu. Semua ini terpengaruh oleh budaya barat (Eropa) dalam hal ini Negara

perempuan Eropa (Belanda) kemudian semakin merambah masyarakat perempuan di Yogyakarta.

Selain berpredikat sebagai Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta mempunyai berbagai predikat lain yaitu sebagai kota pendidikan, dijuluki kota pendidikan karena banyaknya sekolah atau lebih tepatnya banyaknya universitas yang berada di Yogyakarta dan dapat dikatakan hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota ini. Hal inilah yang menjadikan Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan. Kemudian disebut sebagai kota budaya, sesuai dengan perannya sebagai wilayah Kerajaan yang besar, yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan tradisional, di tengah gempuran modernisasi dan arus globalisasi. Dan dikenal pula dengan nama kota gudeg karena nama makanan khas dan lezat asli Yogyakarta ini sudah terkenal ke seluruh penjuru negeri.

Berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, becak di Jogja bukan dihilangkan, tapi dilestarikan oleh pemerintah daerah. Becak di Jogja dianggap bagian dari identitas budaya Jawa. Secara khusus, Gusti Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa becak dapat dijadikan ciri penanda budaya Jawa, sehingga harus dijaga kelangsungan hidupnya. Becak Jogja menjadi daya tarik tersendiri buat turis lokal maupun asing yang berkunjung ke kota gudeg ini. Bayarannya yang murah dan tempatnya yang nyaman, membuat becak menjadi pilihan transportasi menyenangkan di Yogyakarta. Wisatawan dapat menikmati keasrian kota Yogya secara lengkap. Tidak hanya itu, dengan menggunakan becak,

pengunjung dan sang pengayuh becak dapat berinteraksi secara langsung dan terbuka. Bahkan, tidak jarang tukang becak dapat menguasai bahasa Inggris untuk dapat “mengobrol” dengan wisatawan asing.



Gambar 3.1.6 : Becak, salah satu transportasi yang menjadi ciri khas Yogyakarta

Perubahan mulai terjadi dari berbagai aspek seperti, bermacam perusahaan dan industri bermunculan, pembukaan tempat pemukiman, pembangunan gedung sekolah, pembukaan jalan baru, gedung pertemuan, bioskop, hotel, rumah sakit dan tempat ibadah, mengubah segi fisik kota Kota Yogyakarta. Dahulu Kota Yogyakarta identik dengan alat transportasi tradisional seperti andong, becak dan sepeda yang bebas dari polusi, namun semua ini sudah mulai ditinggalkan seiring tumbuhnya berbagai infrastruktur modern bermunculan yang memacu perkembangan

identik dengan tradisional sedikit demi sedikit mulai pudar dan bergeser menuju kota Kosmopolitan.

Identitas lebih berupa suatu proses negosiasi atas dasar berbagai tujuan dan kepentingan. Identitas akan lebih ditentukan oleh politik kebudayaan. Isu yang berkembang terhadap konsep kebudayaan pun akan mengalami perubahan, seiring dengan perubahan masyarakat dari bersifat plural ke arah multikultural.

Memang dalam perkembangannya, keistimewaan yang melekat pada Yogyakarta dihubungkan dengan berbagai konteks, seperti konteks budaya yang menyebut bahwa Yogyakarta adalah kota budaya sekaligus kota pendidikan. Dalam konteks sebagai kota budaya, Yogyakarta dilihat sebagai daerah yang memiliki kebudayaan yang khas, sebagaimana terlihat dari artefak maupun adat yang masih berlangsung sampai saat ini. Bangunan bersejarah, terutama yang berkaitan dengan keberadaan keraton, bisa dirujuk sebagai salah satu artefak budaya yang khas Yogyakarta. Beragam upacara adat pun masih banyak dilestarikan di Yogyakarta, seperti sekaten, menjadi kekhasan Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta dikenal sebagai kota yang dipenuhi berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Yogyakarta juga dikenal sebagai miniatur Indonesia karena banyaknya orang yang ingin belajar di Yogyakarta. Dari berbagai macam